ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG

Oleh :

RIKI SIANTURI

01111003126

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2016

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama	: Riki Sianturi
Nim	: 01111003126
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan	Dosen Pembimbing
Tanggal : 24 Mei 2016	Ketua : Ermadiani, SE, MM, Ak, CA NIP : 196608201994022001
Tanggal : 4 Mei 2016	Anggota: Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak NIP : 197206062000032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG

DISUSUN OLEH:

NAMA	: RIKI SIANTURI
NIM	: 01111003126
FAKULTAS	: EKONOMI
JURUSAN	: AKUNTANSI
BIDANG KAJIAN	: PERPAJAKAN

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Agustus 2015

Ketua	Anggota	Anggota
Ermadiani, S.E., MM., Ak., CA	Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP 1966 0820 199402 2 001	NIP 19780210 200112 2 001	NIP 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

NamaMahasiswa	: Riki Sianturi
NIM	: 01111003126
Jurusan	: Akuntansi
BidangKajian	: Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa skripsi berjudul:
Analisis atas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Pembimbing

Ketua	: Ermadiani, S.E, M.M, Ak. CA.
Anggota	: Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak
TanggalUjian	: 29 Juli 2016

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Inderalaya, 29 Agustus 2016
Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
A33DDAEF085517508
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Riki Sianturi
NIM. 01111003126

MOTTO

“Jadilah dirimu sendiri”

“Lakukan apa yang ingin kamu lakukan,

bukan yang orang lain inginkan”

“Hidup adalah pilihan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, karena atas izin-Nya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Skripsi ini mengambil judul **"Analisis atas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Dispendaa Kota Palembang"**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap semoga dengan penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat umum, akademisi, dan khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna di kemudian hari.

Penulis

Riki Sianturi

ABSTRAK

Analisis atas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada DISPENDA Kota Palembang

Oleh :

Riki Sianturi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran serta pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan telah berjalan dengan baik. Namun masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pemungutan dibagian pendataan dan pendaftaran serta bagian pembukuan dan pelaporan. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah pemisahan fungsi pendaftaran dan pendataan serta fungsi pembukuan dan pelaporan agar dapat menjalankan fungsi secara maksimal serta menuntut keaktifan fiskus dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan yang berlaku agar dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi.

Kata Kunci : *Sistem dan Prosedur, Pelaksanaan Pemungutan, Pajak Restoran*

Ketua	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M, Ak, CA	Hj. Rela Sari, SE, M.Si, Ak
NIP 19660820 199402 2 001	NIP 19720606 200003 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

Analysis of Restaurant Tax Collection Procedures at DISPENDA Palembang

By:

Riki Sianturi
Ermadiani, S.E., MM., Ak., CA
Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak

This study aims to describe the implementation of system, procedures and the implementation of restaurant tax collection in Dispenda Palembang. The type of research used is descriptive qualitative. The result from this study indicated that the system and procedures are compliance with local regulation number 12 of 2010 and run well. However, it was still found deficiencies in the implementation of the collection of data and the registration section as well as parts of accounting and reporting. Advice can be given to the weakness found are the separation of the functions of registration and data collection as well as accounting and reporting functions in order to function optimally and to demand the liveliness of the tax authorities in supervising the implementation of the applicable voting in order to minimize fraud occuring.

Keywords: *System and Procedures, Implementation Voting, Restaurant Tax*

First Advisor	Member
Ermadiani, S.E., MM., Ak., CA	Hj. Rela Sari, S.E, M.Si, Ak
NIP 19660820 199402 2 001	NIP 19720606 200003 2 001

Known by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP 19730317 199703 1 002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	**:** Riki Sianturi
Jenis Kelamin	**:** Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir	**:** Tanjung Enim / 8 November 1993
Agama	**:** Kristen
Status	**:** Belum Menikah
Alamat Rumah (Orang Tua)	**:** Jl. Siantar Timur No. 12 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, Sumatera Utara
Alamat Email	**:** riki.sianturi8@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar	**:** SD Negeri 13 Tanjung Enim
SMP	**:** SMP Xaverius Emmanuel Tanjung Enim
SMA	**:** SMA Negeri 1 Muara Enim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
1.5. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1. Landasan Teori 8
2.1.1. Teori bakti 8
2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial 9
2.1.3. Pengertian Prosedur 10
2.2. Pajak 11
2.2.1. Pengertian Pajak 11
2.2.2. Pengelompokan Pajak 12
2.2.3. Fungsi Pajak 13
2.2.4. Tarif Pajak 14
2.2.5. Syarat Pemungutan Pajak 15
2.2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak 16
2.2.7. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak 19
2.2.8. Hambatan Pemungutan Pajak 20
2.3. Pajak Daerah 21
2.3.1. Pengertian Pajak Daerah 21
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 21
2.3.3. Jenis Pajak Daerah 22

2.3.4. Tarif Pajak Daerah 23
2.4. Pajak Restoran 25
2.4.1. Dasar Hukum Pajak Restoran 25
2.4.2. Pengertian Pajak Restoran 26
2.4.3. Subjek Pajak Restoran 26
2.4.4. Objek Pajak Restoran 26
2.4.5. Penelitian Terdahulu 27
2.4.6. Kerangka Pemikiran 30

BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 33
3.2. Jenis Penelitian 33
3.3. Jenis dan Sumber Data 34
3.4. Metode Pengumpulan Data 34
3.5. Metode Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
4.1. Gambaran Umum Dispenda 37
4.1.1. Sejarah Singkat Dispenda 37
4.1.2. Fungsi dan Tugas Pokok Dispenda 38
4.1.3. Visi dan Misi Dispenda 39
4.1.4. Struktur Organisasi Dispenda 40
4.2. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Perda Pemkot Palembang Nomor 12 Tahun 2010 41
4.2.1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak 42
4.2.2. Perhitungan dan Penetapan Pajak 45
4.2.3. Pembayaran Pajak 48
4.2.4. Penagihan Pajak 49
4.2.5. Pembukuan /Pelaporan Pajak 52
4.2.6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminitrasi 52
4.3. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran oleh Dispenda 53
4.3.1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak 53
4.3.2. Perhitungan dan Penetapan Pajak 54
4.3.3. Pembayaran Pajak 55
4.3.4. Penagihan Pajak 55
4.3.5. Pembukuan/ Pelaporan Pajak 56
4.3.6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminitrasi 57
4.4. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dispenda 58
4.4.1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak 58
4.4.2. Perhitungan dan Penetapan Pajak 69
4.4.3. Pembayaran Pajak 60

4.4.4. Penagihan Pajak 60
4.4.5. Pembukuan / Pelaporan Pajak 61
4.4.6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 62
4.5. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Dispenda 63
4.6. Analisis atas Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70
5.1 Kesimpulan 70
5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

DAFTAR TABEL

Tabel halaman

1.1. Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang 2009-2014..... 3

3.1. Kriteria Efektivitas..... 36

4.1. Efektivitas Pajak Restoran 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar halaman

2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 30
4.1. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan (Wajib Pajak) 42
4.2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan (Dispenda)..... 43
4.3. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak 45
4.4. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran 48
4.5. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran 50
4.6. Grafik Efektivitas Pajak Restoran..... 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Hal ini hanya dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagi Indonesia keterbatasan dana merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber dana yang tersedia, yng digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunn adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan

bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dan yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pajak adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku, adalah: *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Didalam *Official Assessment System*, wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak (fiscus). Dalam sistem ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Sedangkan didalam *Self Assessment System*, wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.

Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System*, maka hal ini menuntut keaktifan para wajib pajak untuk melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Hal inilah yang memungkinkan tidak semua besarnya pajak dilaporkan oleh wajib pajak, oleh

karena itu para pegawai perpajakan dituntut untuk mengawasi para wajib pajak ini agar pelaporan pajaknya sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka dapatkan. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang adalah Pajak Restoran, pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan restoran termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya, termasuk usaha boga dan catering.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang diperoleh data mengenai penerimaan pajak restoran Kota Palembang yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang 2009-2014

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2009	14.600.000.000,00	16.095.416.841,00
2010	17.285.835.800,00	19.226.002.354,00
2011	22.479.450.500,00	24.303.405.288,50
2012	27.500.000.000,00	31.594.733.209,30
2013	31.500.000.000,00	35.926.603.685,26

2014	38.000.000.000,00	45.527.716.420,82

Sumber: Dispenda Kota Palembang, 2015

Berdasarkan data diatas, penerimaan daerah melalui pajak restoran dapat dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi keberhasilan tersendiri bagi DISPENDA dalam hal mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pengelolaan daerah.

Dengan adanya Pajak Restoran, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sisi administrasi, pengelolaan dilapangan, maupun implikasinya. Beberapa hal yang menjadi celah dari pajak restoran ini terletak pada penetapan target yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang sudah dilakukan dan tinjauan prosedur pemungutan pajak restoran. Salah satunya dengan *Budget Slack*, yaitu penurunan target yang ditetapkan sehingga realisasinya terlihat selalu mencapai target atau bahkan lebih dari target tersebut dan laporannya terlihat baik.

Berdasarkan uraian diatas, mak penelitian ini diberi judul **"Analisis atas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Dispenda Kota Palembang"**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang dan keterbatasan waktu yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi kegiatan serta ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Apakah prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah dilakukan secara efektif dan efisien ?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Penelitian ini akan digunakan sebagai penambah pengetahuan pembaca tentang prosedur pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
   b) Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan wawasan pembaca tentang keefektifan pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) Kota Palembang.

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universtitas Sriwijaya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (Lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang ingin dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang berupa teori yang mendukung penelitian, terutama konsep dasar perpajakan, khususnya tentang pajak daerah yaitu pajak restoran, serta tinjauan atas penelitian lain yang relevan, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum / deskripsi objek penelitian, mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang sesuai dengan peraturan daerah (Perda) No. 12 Tahun 2010, analisis atas prosedur pemungutan pajak restoran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, serta efektifitas pajak restoran dan prospek penerimaan pajak restoran selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2009 sampai tahun 2014.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengungkapkan penarikan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan juga saran-saran yang diberikan penulis dari hasil analisis yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi Kelima.* Yogyakarta: BPFE.

Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14 No. 2- Mei 2014.

H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya.* Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Khairunnisa. 2011. *Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung).* Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 N0. 3, Desember 2011, hlm. 227-244.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima.* Jakarta: Salemba Empat.

Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., 2002, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah,* Yogyakarta : YPAPI.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Palembang: Dispenda

Sanusi, Achmad. 2002. *Pedoman Evaluasi Atas Laporan akuntabilitas Kinerja Unit-Unit Kerja di Lingkungan BPKP*. Bandung: BPKP.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Perpajakan No 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Jakarta.

Wakhinuddin. 2009. *Evaluasi Program dan Lembaga*. Wordpress.com.

Yani, Ahmad. 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusta dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.